

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**(Skripsi)**

**Oleh**

*Azra Maidearnis*  
**NPM 1816041008**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF LAMPUNG CENTRAL REGENCY**

**By**

**Azra Maidearnis**

Based on Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP) which is intended to create good governance that is effective and efficient, as well as the implementation of a good financial reform package. And the Government Internal Control System (SPIP) is implemented in all central and regional governments. That way the Regional Development Planning Agency of Central Lampung Regency is used for planning financial reporting activities.

This study aims to analyze how the implementation of the Government Internal Control System at the Regional Development Planning Agency of Central Lampung Regency in order to create good governance and transparent financial reports, based on the indicators of Thomas B. Smith's theory of implementation model, namely policy idealized, target group, implementing organization, and environmental factors. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation.

Based on Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP) which is intended to create good governance that is effective and efficient, as well as the implementation of a good financial reform package. And the Government Internal Control System (SPIP) is implemented in all central and regional governments. That way the Regional Development Planning Agency of Central Lampung Regency is used for planning financial reporting activities.

**Keywords:** Policy, implementation, Government Internal Control System.

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh**

**Azra Maidearnis**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang bersifat efektif dan efisien, juga sebagai pelaksanaan dari paket reformasi keuangan yang baik. Serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan di seluruh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dengan begitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah digunakan untuk kegiatan pelaporan keuangan perencanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta laporan keuangan yang transparan, dengan berdasarkan pada indikator teori model implementasi Thomas B. Smith yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Adapun metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah masih belum efektif, diketahui dari masih banyak risiko yang muncul selama pelaksanaannya, pemahaman yang masih kurang, serta masih banyak kendala lainnya pada saat pelaksanaannya. Dari hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan agar implementor lebih meningkatkan pemahaman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta peran aktif para atasan selama pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini.

**Kata Kunci:** Kebijakan, implementasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

*Azra Maidearnis*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Agra Maidearnis**

No. Pokok Mahasiswa : **1816041008**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.**

**NIP 19810628 200501 1 003**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**an Sekeloa**

**Meilyana, S.I.P., M.A.**

**NIP 19740520 200112 2 002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.**



**Penguji : Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 September 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 26 September 2022

Yang membuat pernyataan,



*Azra Maidearnis*  
Azra Maidearnis  
NPM . 1816041008

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Azra Maidearnis, lahir di Bukittinggi pada tanggal 22 juni 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda Mawardi dan ibunda Elbaidar. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Darulfallah selesai pada tahun 2006, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 07 Ekor Lubuk dan selesai pada tahun 2012. Kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 3 Padang Panjang yang selesai pada tahun 2015, dan menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Batipuh Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) hingga selesai pada tahun 2018. Penulis diterima di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis ikut bergabung di salah satu organisasi yaitu HIMAGARA UNILA. Pada bulan Januari hingga Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022 penulis telah melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Tengah.

Berkat rahmat dari Allah SWT, do'a serta dukungan oleh orang tua, saudara, dan semua teman yang dikenal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Administrasi Negara pada tahun 2022.

## **MOTTO**

**“Cukup Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”**

**(QS: Ali ‘Imran 173)**

**“Ada keindahan dalam segala hal, hanya saja tidak semua orang (bisa)  
melihatnya”**

**(Park Jimin)**

**“Jangan memaksakan dirimu berubah, kamu sempurna dengan  
kekuranganmu”**

**(Kim Namjoon)**

**“As much as the world fails you, never regret having a good heart”**

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT atas rahmat, karunia dan berkah-Nya..

Aku persembahkan skripsi sederhana ini kepada:

**IBU DAN AYAH KU TERCINTA**

**ELBAIDAR DAN MAWARDI**

Terimakasih atas segala do'a, cinta, sayang, pengorbanan, perjuangan, dan dukungan yang sampai sekarang tidak terhitung jumlahnya. Terimakasih juga karena kalian masih bisa membimbing dan menemaniku sampai sejauh ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, umur panjang dan keharmonisan keluarga kita, Aamiin.

Kupersembahkan kelulusanku ini untuk kalian semua sebagai janji, tugas dan kewajiban seorang anak dan kakak. Aku akan terus berjuang dalam mencapai apa yang dicita-citakan dan akan terus berusaha membahagiakan kalian.

Ku ucapkan terimakasih sekali lagi kepada pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan maupun do'a.

Para dosen pendidik yang telah membimbing dan mendidik dengan sabar tanpa tanda jasa.

Sahabat dan teman-teman serta

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, penulisan, maupun tata bahasanya, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang baik untuk tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini diantaranya:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N, M.PA. Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, nasehat, dan juga bimbingannya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga menjadi skripsi yang lebih baik.
5. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.S. selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, dan juga bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik.
6. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si,. Selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, terima kasih atas semua bimbingan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu di BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah khususnya bidang P2EP atas bantuan dan masukannya yang sangat informatif sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teristimewa kedua orang tuaku terkasih Bapak Mawardi dan Ibu Elbaidar. Terima kasih untuk semua doa yang tanpa diminta selalu kalian haturkan untuk anak-anakmu, serta usaha, kerja keras, restu, dan kasih sayang yang tiada henti diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta keberkahan dunia dan akhirat.
10. Adikku yang cantik Rifda Mardhiyah, terima kasih yang selalu memberikan semangat dan bantuannya. Semoga kesuksesan dapat mengiringi kita bersama sehingga bisa membahagiakan Bapak dan Ibu.
11. Keluarga besarku terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materil. Semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian
12. Teruntuk Ade Rannie Shabiila dan Nadia Rahmawati, terima kasih atas semua bantuan dari awal perkuliahan juga membersamai semasa perkuliahan hingga saat ini. Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu dan jarak.

13. Saudari Mitta Amelia, Zani Venty Ryana, Asri Nur Salmah. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, effort, do'a, nasehat, loyalitas, pelajaran, dan kebahagiaan selama perkuliahan yang telah kalian berikan.
14. Untuk Intan, Sella, Agung Saputra, Andi, Danar, dan semua teman-teman seperjuangan Andalusia. Terima kasih sudah banyak membantu selama proses perkuliahan ini.
15. Untuk para teman-teman Saputri, Zahratul Azizah, Farah Hanifah, Rafi Eka Candra. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan, bantuan, nasehat, pelajaran dan do'a yang telah diberikan kepada penulis.
16. Seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua.

Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang kalian semua berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap dan berdoa semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan mereka yang telah menyediakan waktu untuk membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 26 September 2022

Penulis

Azra Maidearnis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .....	16
2.2.1 Kebijakan Publik.....	16
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	17
2.2.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	21
2.3 Tinjauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	26
2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	26
2.3.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	28
2.3.3 Prinsip Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	30
2.4 Kerangka Pikiran.....	31
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	34
3.2 Fokus Penelitian .....	35
3.2.1 Tahapan-Tahapan Implementasi Kebijakan.....	35
3.2.2 Capaian Implementasi Kebijakan .....	36
3.2.3 Variabel Penelitian .....	37

3.3 Lokasi Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	39
3.4.1 Data Primer .....	39
3.4.2 Data Sekunder .....	40
3.5 Informan Penelitian.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.1 Wawancara.....	41
3.6.2 Observasi.....	43
3.6.3 Dokumentasi .....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
3.7.1 Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....	46
3.7.2 Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	47
3.7.3 Kesimpulan ( <i>Verifikasi</i> ) .....	47
3.8 Teknik Keabsahan Data .....	47
3.8.1 Triangulasi.....	48
3.8.2 Kecukupan Refensial .....	48
3.8.3 Keteralihan .....	48
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum.....	50
4.1.1 Karakteristik Wilayah Penelitian .....	50
4.1.2 Profil Organisasi .....	52
4.1.3 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.....	53
4.1.4 Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.....	54
4.1.5 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.....	55
4.2 Hasil Penelitian .....	57
4.2.1 Tahapan Implementasi Kebijakan.....	58
4.2.2 Capaian Implementasi Kebijakan .....	63
4.2.3 Variabel Implementasi Kebijakan.....	70
4.3 Pembahasan Penelitian.....	100

4.3.1 Tahapan dan Capaian Implementasi Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	102
4.3.2 Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	106
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>120</b>
5.1 Kesimpulan .....	120
5.2 Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Tingkat Kematangan SPIP dan Karakteristiknya .....	9
Tabel 2 Review Penelitian Terlebih Dahulu .....	14
Tabel 3. Nama Informan .....	40
Tabel 4 Gambaran Data Informan Penelitian.....	42
Tabel 5. Gambaran Objek Observasi Penelitian .....	44
Tabel 6. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian .....	45
Tabel 7 Analisis Risiko SPIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah .....	76

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	30
Gambar 2 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.....	51
Gambar 4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah .....	56
Gambar 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.....	64
Gambar 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021. ....	65
Gambar 7 Pelatihan SPIP Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah .....	73
Gambar 8 Pemantauan Pelaksanaan SPIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.....	86
Gambar 9 Dokumen Pendukung penginputan Data dalam SPIP .....	94
Gambar 10 Tampilan Halaman Utama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	95

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan setiap Negara demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada dasarnya pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan sebuah pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemerintahan yang baik ialah bagaimana terselenggaranya pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam sebuah dokumen *United Nations Development Program* (UNDP) adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi yang bertujuan untuk mengelola urusan-urusan negara dalam semua tingkat (Wafa, Basri, 2021).

Pemerintahan yang baik pada dasarnya menuntut keterlibatan keseluruhan pemangku kepentingan yang ada di birokrasi maupun lingkungan masyarakat. Di Indonesia tata kelola pemerintahan merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sebagaimana sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pancasila agar pada akhirnya sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia (Satya, 2017). Pengelolaan pemerintahan yang baik ialah pemerintah yang bisa memberikan kepastian, kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan baik tersebut, munculah berbagai tuntutan dari semua kalangan masyarakat, mengenai bagaimana pemerintahan bisa menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman (Adhitya, 2020).

Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan sebuah kemampuan yang bisa mengimbangi terselenggaranya pemerintahan yang baik (Supriadi, 2015). Salah satu cara yang bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia ialah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju memunculkan temuan-temuan baru terutama di bidang teknologi, maka dari itu memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang akan bisa berdampak langsung kepada jalanya sistem pemerintahan yang baik di Indonesia. Dan juga sistem manajemen informasi sangat mempengaruhi terselenggaranya pemerintahan yang baik, dimana sistem manajemen informasi ini merupakan perpaduan antara SDM dengan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola dan mengambil data (Eti, 2016).

Teknologi sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk bagaimana mengelola pemerintahan. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat menuntut semua perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk mengelola tata pemerintahan yang baik. Disamping itu pemerintah merupakan fasilitator serta pendorong dalam keberhasilan pembangunan, dimana keberhasilan tersebut harus didukung dengan kecepatan arus data dan informasi antar instansi supaya bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan teknologi dilakukan agar dapat meminimalisir kesalahan maupun penyimpangan yang terjadi dalam pengalokasian dana, praktik korupsi dan lainnya. Memanfaatkan teknologi dalam mengelola pemerintahan juga memerlukan kemampuan untuk mengelola keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata pada pelaksanaannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di tingkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan

mengkoordinasikan penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah (Rorano & Pengkey, 2013). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah melaksanakan tugas-tugas otonomi di bidang perencanaan dan pembangunan, juga memiliki visi misi Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang diselaraskan dengan visi misi pemerintahan daerah dengan pelaksanaan program-program kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan ketentuan undang-undang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur, Bupati/WaliKota, dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan tugas mengenai perencanaan atas semua pembangunan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terkait dengan melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Berangkat dari sini harapan besar untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam pembuatan laporan keuangan perencanaan pembangunan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di pemerintahan daerah tersebut, serta merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembanguna daerah yang setelah kegiatan tersebut akan dibuatkan laporan keuangan mengenai perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan kegiatan perencanaan yang nantinya akan melakukan pelaporan dari perencanaan yang telah disusun kepada badan maupun instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaporan kauangan perencanaan pembangunan tersebut.

Penyediaan informasi terkait dengan posisi keuangan dan keseluruhan transaksi selama satu periode pelaporan yang dapat dipercaya dan relevan. Maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyusun pelaporan keuangan mengenai perencanaan pembangunan yang telah berjalan. Tujuan dilakukannya pelaporan keuangan ini adalah untuk menjadikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan suatu pelaporan dalam mengerjakan dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Rondonuwu, 2018). Oleh sebab itulah laporan keuangan perencanaan pembangunan ini harus disusun dengan sebaik mungkin dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang berjalan, supaya pengelolaan laporan keuangan dapat berjalan dengan sangat baik, efektif dan efisien serta memudahkan banyak pihak untuk memahaminya.

Pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan perencanaan pembangunan yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Pelaksanaannya dimulai dengan mengumpulkan data-data maupun dokumen pendukung pelaporan keuangan perencanaan pembangunan. Data tersebut bukan hanya berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah akan tetapi juga data maupun dokumen yang berasal dari keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di Kabupaten Lampung Tengah. Diketahui jumlah data maupun dokumen tersebut tidaklah sedikit. Ditambah dengan pengerjaan yang manual untuk kegiatan pelaporan perencanaan ini akan menyita banyak waktu untuk pengerjaannya, hal ini juga diakibatkan oleh belum adanya wadah yang bisa melaksanakan kegiatan pelaporan perencanaan agar dilakukan lebih efektif dan efisien. Dengan waktu yang relatif lama untuk melakukan tahapan kegiatan pelaporan keuangan perencanaan pembangunan ini yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan laporan keuangan perencanaan pembangunan melebihi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan mendapatkan teguran.

Selama kegiatan pelaporan keuangan perencanaan pembangunan dilakukan tidak selamanya berjalan lancar. Akan ada kendala yang dihadapi selama melakukan kegiatan pelaporan keuangan perencanaan pembangunan, yang selama ini hanya mengandalkan kumpulan-kumpulan data maupun dokumen yang telah disiapkan, dengan adanya inovasi penggunaan SPIP akan memunculkan kebingungan dalam penggunaannya. Untuk pembuatan laporan yang dikerjakan secara manual tak jarang dalam kegiatan pembuatan pelaporan ini sering kali ditemukan kesalahan data ataupun ditemukannya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaporan tersebut. Adanya fenomena kesalahan maupun penyimpangan yang ditemukan tersebut menunjukkan masih rendahnya kinerja aparatur dalam pembuatan laporan yang masih belum efektif dan relatif masih rendah dalam kinerja mereka.

Diketahui kegiatan pembuatan laporan keuangan perencanaan pembangunan yang relatif lama prosesnya. Hal itu disebabkan masih banyak ditemukannya kesulitan-kesulitan selama proses kegiatan pembuatan pelaporan keuangan tersebut. Seperti bagaimana pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengalami kesulitan dalam menyamakan data maupun dokumen yang diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan, kesulitan untuk mengsinkronkan data-data terkait laporan keuangan yang dikarenakan pelaporan yang masih dikerjakan secara manual tersebut. Dimana data maupun dokumen yang sudah dikumpulkan mempunyai peranan yang penting untuk tahap pengerjaan laporan keuangan perencanaan pembangunan ini.

Kelengkapan data ataupun dokumen pada saat melakukan tahapan pelaporan keuangan ini mempunyai peran penting. Agar keaslian dan kebenaran data dalam kegiatan pelaporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan data maupun dokumen yang didapatkan dan sesuai dengan aslinya. Namun dengan melihat pengerjaan laporan keuangan yang masih dikerjakan secara manual memungkinkan muncul kesalahan pengiputan data,

yang akan bisa berakibat fatal dalam laporan keuangan perencanaan keuangan ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dan adanya kemungkinan para aparatur maupun yang lainnya melakukan penyimpangan terhadap pelaporan keuangan yang dikerjakan dengan memanfaatkan kelemahan penginputan data secara manual tersebut. Untuk itu peran teknologi sangat berpengaruh terhadap data-data yang ada, serta bagaimana data tersebut diolah sebaik mungkin sebagaimana semestinya.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang bisa memberikan keyakinan yang bisa memadai bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan di instansi pemerintahan dapat sejalan dengan perkembangan teknologi. Dan penyelenggaraan yang dilakukan di instansi tersebut dapat mewujudkan tujuannya secara efisien dan efektif. Sistem inipun dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pada lingkupan instansi pemerintahan juga dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan dengan tujuan untuk mendukung agar penyelenggaraan pada organisasi maupun instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Penggunaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan untuk mewujudkannya maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Rizal, 2015).

Sistem pengendalian dalam teori organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang mana sistem ini dirancang untuk membantu organisasi-organisasi untuk mencapai tujuannya (Ompusunggu, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini menjelaskan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebuah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan keseluruhan pegawai untuk bisa memberikan sebuah keyakinan yang

memadai akan terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan juga dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 berbunyi “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah salah satu instansi yang ada di pemerintahan daerah. Dimana instansi ini melakukan inovasi dalam pelaksanaan kerja mereka, terutama dalam hal kegiatan pelaporan keuangan. Inovasi yang dilakukan dengan mengandalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang juga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini masih menjadi suatu hal yang fenomena dalam pelaksanaannya. Dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang terlebih dahulu telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi bagaimana cara penggunaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tersebut. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan bagaimana manfaat penggunaan sistem tersebut, dan juga berkaitan dengan keefektifan dalam bekerja jika menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan begitu melakukan inovasi agar kegiatan pelaporan keuangan perencanaan pembangunan ini bisa dilakukan dengan efektif, relevan. Tujuan dari penggunaan SPIP agar jauh dari adanya penyimpangan dalam kegiatan pelaporan keuangan perencanaan pembangunan. Dimana sistem ini ditujukan untuk keandalan pelaporan keuangan sebagaimana semestinya. Inovasi dapat diartikan sebagai proses yang mencakup penerapan teknologi maupun perubahan-perubahan dalam dan penyempurnaan dalam suatu instansi ataupun organisasi (Wibawa, 2009). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang sedang melakukan

inovasi melalui penggunaan SPIP ini, diharapkan supaya pelaporan keuangan akan lebih efektif dengan dan waktu pengerjaannya tidak membutuhkan waktu lama.

Sistem Pengendalian Intern sangat dibutuhkan oleh pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan organisasi-organisasi yang ada dalam pemerintahan daerah tersebut. Dalam menerapkan sistem pengendalian ini memungkinkan untuk mereka bisa mengawasi pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintahan daerah tersebut. Sehingga dengan penggunaan Sistem Pengendalian Intern akan lebih terjamin untuk mencapai tujuan dari pemerintahan daerah tersebut. Juga untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga didukung dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, yang merupakan hasil keluaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Melalui Inpres (Instruksi Presiden) No.9 Tahun 2014 kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional 59 Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk dapat mempercepat keefektivitasan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah dan pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing (Ompusunggu, 2018). Adapun tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan di pemerintahan daerah akan dapat tercapai jika dalam pengimplementasiannya sistem pengendalian intern ini menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adapun unsur-unsurnya yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

Adapun dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdapat beberapa karakteristik untuk mengukur tingkat kematangan sistem ini, dan dengan adanya karakteristik ini dapat memudahkan untuk menilai pencapaian implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini. Karakteristik tingkat maturitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Kematangan SPIP dan Karakteristiknya

Tingkat	Karakteristik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Level 0 Belum ada	Kementrian/Lembaga/Pemerintahan Daerah dalam hal ini sama sekali belum memiliki kebijakan atau prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan pratek-pratek sistem pengendalian intern
Level 1 Rintisan	Dalam pengendalian intern, tetapi dalam pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan untuk bersifat ad-hoc serta tidak terorganisasi dengan baik tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
Level 2 Berkembang	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Level 3 Terdefinisi	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai
Level 4 Tatakelola dan terukur	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi
Level 5 Optimum	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi

Sumber: Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia

Unsur-unsur yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur dalam pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern ini. Dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu mempertimbangkan mulai dari aspek biaya-manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam instansi pemerintahan terbukti memiliki dampak yang sangat positif dalam kinerja pegawai di instansi pemerintahan. Dibalik kesuksesan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di instansi pemerintahan. Oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap lembaga publik maupun instansi pemerintahan untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penggunaan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan perencanaan pembangunan yang dilakukan di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah terbilang baru. Dengan menggunakan inovasi SPIP ini dan akan butuh waktu untuk bisa menyesuaikan maupun beradaptasi dengan inovasi ini, dikarenakan perubahan besar yang terjadi dari pengerjaan manual menjadi menggunakan perkembangan teknologi yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dimana bentuk inovasi merupakan perwujudan dari *Good Governace* atau perwujudan dari bentuk pemerintahan yang baik yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Inovasi dilakukan merupakan upaya dari kualitas pelaporan keuangan perencanaan pembangunan yang baik, serta bisa mengandalkan data-data maupun dokumen dengan semestinya. Akan tetapi pada dasarnya ketika Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah melakukan inovasi ini akan menimbulkan tantangan yang besar selama pelaksanaannya, tantangan itupun muncul selama pengerjaan tahapan pelaporan keuangan perencanaan pembangunan yang dilakukan di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Adanya kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah kinerja pegawai yang diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien, namun hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat pelaksanaannya, kenyataannya para pegawai yang ada di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mempunyai kompetensi, pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang berbeda-beda melakukan pekerjaan mereka, maka disinilah dibutuhkan pelaksanaan SPIP dapat diterapkan dengan baik untuk dapat meningkatkan kinerja para pegawai dalam pembuatan laporan perencanaan tersebut. dan juga peran implementor sangat berpengaruh atas pelaksanaan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tujuan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini dapat meminimalisir penyimpangan selama pembuatan pelaporan, akan tetapi pada faktanya masih banyaknya ditemukan penyimpangan data selama proses pelaksanaannya.

Inovasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui penggunaan SPIP dalam pelaporan keuangan perencanaan pembangunan ini, disini akan berfokus pada bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dilihat dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini yang mempunyai dampak yang signifikan dalam pelaporan keuangan perencanaan pembangunan, dan juga bagaimana juga tantangan-tantangan yang akan timbul selama pelaksanaan SPIP ini. Efektivitas pelaksanaan SPIP ini dapat dilihat dari bagaimana atribut dokumentasi, pemahaman, sikap dan tindakan, serta bagaimana proses pemantauan dilakukan pada saat Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan kebijakan SPIP tersebut.

Adapun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini mempunyai peran dan fungsi yang sangat signifikan dalam keefektifan dan efisiensi dalam membantu pekerjaan. Dilihat dari bagaimana peran dan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat di implementasikan dalam proses pelaporan keuangan perencanaan pembangunan yang ada di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu pentingnya mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern ini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung tengah. Kendala apa saja yang ditemukan selama penerapan sistem pengendalian intern ini. serta bagaimana dengan peran para pimpinan di instansi pelaksana dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul ***“IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, maka dalam penelitian ini ada dirumusan beberapa masalah dalam penelitian yang akan diteliti:

1. Bagaimana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis bagaimana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan juga informasi khususnya bagi penulis, serta pihak-pihak lain pada umumnya, yang tentunya berkaitan langsung dengan bagaimana implementasi dari program Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan sebagai pembandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan fakta yang di lapangan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang digunakan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata pada jurusan ilmu administrasi negara, dan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan keilmuan administrasi negara yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan konsep perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi untuk penelitian akan diteliti, disamping itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini peneliti mengambil 3 penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian yang akan peneliti teliti untuk dijadikan sebagai perbandingan yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Review Penelitian Terlebih Dahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Achmad Nasution (JiP Vol. 3 No. 1 Januari – Juli 2016)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Dalam penelitian ini penerapan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Boyolali dalam menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yaitu mengenai lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, \aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dalam hal ini masih ditemukannya beberapa kendala seperti kelemahan yang terjadi di lingkungan pengendalian mengenai sub unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern ini. Kelemahan lainnya yang ditemukan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			ialah dalam unsur informasi dan komunikasi dimana belum adanya media langsung yang dapat diakses oleh masyarakat.
2	Widya Pratiwi (Jurnal Ekonomi Stie Haji Agus Salim Bukittinggi. Vol. XII, No, 2 September 2012)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus : Pemerintahan Kabupaten Bungo)	Dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yang dilakukan di Pemerintahan Bungo dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya dalam pelaksanaannya memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian intern ini, dan juga dalam pelaksanaannya juga belum memenuhi kriteria untuk berjalanya tujuan dari penggunaan sistem pengendalian intern ini. Dimana tujuan dari penggunaan sistem pengendalian ini menjadikan kegiatan yang efektif dan efisien terhadap pengamanan aset sesuai dengan perundang-undangan
3	Andika Restu Adhitya, Jalaluddin (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 4, November 2020)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar	Dalam pengimplementasian sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan insur-unsur dan komponen yang ada dalam sistem pengendalian intern ini

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya ialah tempat penelitian, tempat melakukan penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, perbedaan selanjutnya penelitian

berfokus pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan berpedoman kepada unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, perbedaan selanjutnya terletak pada analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti menggunakan teori Thomas B. Smith untuk menganalisis implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan berlandaskan pada empat indikator dalam model teori Thomas B. Smith, dan perbedaan yang terakhir pada penelitian ini adalah peneliti juga menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SPIIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

## **2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan pada hakikatnya dibuat oleh pemerintah berupa suatu tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik ini ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat umum dan kebijakan publik dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan tertentu baik kebijakan tersebut baik dilakukan maupun tidak. Kebijakan publik juga merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan atau dipandang sebelah mata.

Kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin, kebijakan publik bersifat spesifik dan sempit, akan tetapi luas dan berada pada starata yang strategis. Dan oleh sebab itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai pedoman umum untuk suatu kebijakan dan keputusan khusus yang berada dibawahnya. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama guman mencapai visi dan misi yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Anderson (Eko; Handoyo ,2012.) kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para

aktor atau sejumlah aktor yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Sedangkan menurut Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, pemerintah dalam lingkungan tertentu yang berkaitan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pemahaman di atas dapat disimpulkan kebijakan publik pasti berkaitan dengan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Kebijakan publik bukan saja sekedar persoalan teknis administratif saja, akan tetapi juga berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, oleh karena itu kebijakan publik ini sendiri berlangsung dalam latar (*setting*) kekuasaan tertentu, dengan maksud dalam kebijakan publik ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai dalam pelaksanaannya.

### **2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi dipahami sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang sebelumnya sudah disusun secara baik dan terperinci, yang mana implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna dan layak untuk diterapkan. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Eko, 2012) didefinisikan sebagai sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual maupun pejabat atau kelompok pemerintahan atau kelompok swasta yang diarahkan untuk bisa mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi juga dapat dimaknai sebagai sebuah penyediaan sarana ditujukan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu tersebut. Yang mana akhirnya sesuatu tersebut dapat menimbulkan dampak atau akibat yang berupa Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Edwards III (Imronah n.d.:66) berdasarkan perspektifnya menyatakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang harus di atasi dan dipecahkan. Edwards III juga memperkenalkan adanya sebuah pendekatan dalam masalah-masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan sebuah kebijakan, dan dapat dirumuskan bahwa ada 4 faktor sumber masalah yaitu yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau sikap pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata kelola aliran kerja sebuah birokrasi.

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui program-program agar dapat memenuhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan implementasi juga merupakan aspek yang penting didalam keseluruhan proses kebijakan dan untuk mencapai tujuan tertentu dengan bantuan sarana dan prasaana dalam urutan waktu tertentu. Implementasi kebijakan merupakan bentuk dari penyelesaian masalah yang mana telah dirumuskan terlebih dahulu bagaimana penyelesaiannya oleh perumus kebijakan, dan setelah itu dilakukan pengesahan kebijakan, selanjutnya bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan keluaran kebijakan tersebut.

### **2.2.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses pengambilan sebuah keputusan (*decision making*), dimana kebijakan publik akan lebih efisien ketika berada dalam sebuah ranah pemerintahan yang baik, yang artinya sebuah kekuasaan negara dalam kebijakan publik yang sangat besar. Dalam proses implementasi kebijakan yang menjadi aktor utama

dalam implementasi tersebut ialah birokrat dari semua variabel, akan tetapi di dalam implementasi kebijakan juga terdapat beberapa peran aktor *inside government* yaitu badan yudikatif dan kepolisian, serta aktor *outside government* yaitu peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta para konsultan.

Mengimplementasikan sebuah kebijakan publik terdapat dua pendekatan dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pendekatan diperlukan untuk lebih memahami dan menjelaskan suatu permasalahan dalam implementasi ini (Handoyo 2012). Terdapat dua buah pendekatan dalam implementasi sebuah kebijakan pendekatan top down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down ini disebut juga dengan "*policy contered*" yang dikarenakan fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada sebuah kebijakan dan berusaha memperoleh fakta-fakta terhadap kebijakan yang diimplementasikan itu apakah mampu mencapai tujuannya atau tidak dalam pelaksanaannya.

Pada pendekatan yang bersifat top down, kebijakan yang akan diimplementasikan harus bersifat multi dan lintas, agar semakin banyak aktor yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan menggunakan pendekatan top down ada beberapa tujuan dengan menggunakan pendekatan ini diantaranya yaitu:

- a. Mempelajari dokumen-dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan serta sasaran kebijakan yang akan diimplementasikan
- b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran dari kebijakan yang akan digunakan sebagai instrumen untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut
- c. Mengeidentifikasi apakah keluaran dari kebijakan ini telah diterima dan memiliki manfaat oleh kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

- d. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima

Dalam proses implementasi kebijakan selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan bottom-up, yang pendekatan ini memberikan manfaat untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level dan juga bermanfaat untuk memetakan motif ekonomi politik dari para aktor dalam kebijakan tersebut. Adapun terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan kebijakan menggunakan pendekatan bottom-up ini yaitu:

- a. Memetakan stakeholder, mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini yaitu aktor dan organisasi yang ada level terbawah
- b. Mencari informasi dari para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mengenai pemahaman mereka tentang kebijakan yang akan diimplementasikan dan kepentingan mereka terlibat dalam implementasi kebijakan ini
- c. Memetakan keterkaitan para aktor yang ada pada level bawah dan aktor yang ada pada level atas
- d. Peneliti dalam hal ini terus melakukan kegiatan memetakan aktor yang ada pada level atas untuk mencari informasi yang sama dengan aktor yang ada pada level bawah
- e. Selanjutnya pemetaan terus dilakukan sampai pada level tertinggi

Tentu dalam pelaksanaan implementasi menggunakan pendekatan bottom-up ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing, kelebihan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menggunakan pendekatan bottom-up ini yaitu terjadinya interaksi yang intensif antara para birokrat yang ada pada level atas selaku pengambil keputusan dengan para aktor yang berada pada level bawah dan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun kelemahan dalam menggunakan pendekatan bottom-up ini adalah mereka para aktor yang berada pada level bawah akan lebih memilih memajukan kepentingannya mereka dan kelompok terlebih

dahulu yang dikarenakan tidak adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh aktor yang ada pada level atas dan organisasi di luar kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini.

#### **2.2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan yang telah dibuat dan akan diimplementasikan memiliki beberapa model yang menjadi rancangan dan acuan guna melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun beberapa model implementasi kebijakan publik secara teori adalah sebagai berikut:

##### **1. Model Implementasi Kenijakan George C. Edwards III**

Implementasi sebagai tahapan dalam sebuah proses kebijaksanaan yang berada diantara proses-proses penyusunan kebijaksanaan. Dalam sebuah implementasi terdapat beberapa aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengakatan, dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain (Anggara, 2018). Maka dari itu Edward III menyarankan ada empat isu pokok yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu :

##### **a. Komunikasi**

Komunikasi memiliki fungsi atau peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasi. Intesintas dalam komunikasi kebijakan publik pada tataran sebuah implementasi diperlukan supaya dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait yang dapat berbentuk.

Kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan beserta implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. Komunikasi publik berkaitan langsung dengan bagaimana sebuah kebijakan bisa diimplementasikan pada sebuah

organisasi yang berkaitan langsung dengan sumber daya kebijakan, respon dari pihak yang terlibat, serta struktur organisasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung terutama pada sumber daya manusianya. Adapun sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III yaitu staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap atau komitmen dalam melaksanakan sebuah implementasi kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Dalam melaksanakan kebijakan dibutuhkan hasrat yang kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sebuah mekanisme kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Tentu dalam hal ini memerlukan *Standardt Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana kebijakan. Dan ada saatnya diperlukan fragmentasi yang diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

2. Model Implementasi Kebijakan Thomas B. Smith

Menurut Smith dalam sebuah proses pengimplementasian ada empat variabel yang perlu diperhatikan, dimana keempat variabel tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, dan mempunyai hubungan timbal balik. Model implementasi yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith mempunyai empat variabel dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, variabel tersebut yaitu:

a. Kebijakan Yang Diidealkan (*idealized policy*)

Yaitu pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan. Dan dalam prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Serta koordinasi berpengaruh langsung terhadap komunikasi dalam implementasi kebijakan, semakin baik koordinasi komunikasi yang dilakukan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, maka dalam pelaksanaan tersebut kecil kemungkinan ditemukan kesalahan-kesalahan selama proses pelaksanaannya.

b. Kelompok Sasaran (*target groups*).

Ialah mereka yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumusan kebijakan. Dan adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi ataupun menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan bergantung pada kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka, komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan sehingga buruknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksana kebijakan, serta karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran, seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, pengalaman, dan kesediaan sosial ekonomi

c. Organisasi Pelaksana (*implementing organization*)

Merupakan badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan melihat karakteristik lembaga-lembaga pelaksana yang dilihat dari struktur organisasi lembaga pelaksana kebijakan tersebut

e. Faktor Lingkungan (*environmental factor*)

Suatu unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Bagaimana lembaga pelaksana kebijakan dituntut agar lingkungan sosial, ekonomi, dan politik agar bisa kondusif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini lebih bersifat kepada non teknis yang lebih berfokus pada bagaimana sudut pandang implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan, hubungan antar implementor dengan pelaksana kebijakan, serta kondisi sumber daya manusia selama pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan ini disebut sebagai *A Model of The Policy Implementation* (Tachjan, 2006), yang mana proses implementasi ini ialah sebuah abstraksi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang baik.

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang mempengaruhi dan saling berkaitan, variabel tersebut ialah:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, keberhasilan kinerja implementasi hanya dapat diukur jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang ada dalam level pelaksanaan kebijakaan
- b. Sumber daya, dimana keberhasilan sebuah implementasi sangat bergantung pada sumber daya manusia yang tersedia.

Keberhasilan sebuah implementasi juga bergantung bagaimana dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh sumberdaya manusia yang ada melaksanakan implementasi tersebut.

- c. Karakteristik organisasi pelaksana, kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan juga cocok dengan organisasi pelaksanaannya, organisasi pelaksana yang tersebut meliputi organisasi formal dan organisasi informal.
- d. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dalam tahapan ini berfokus pada koordinasi komunikasi mekanisme antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan implementasi tersebut. Dimana semakin baik komunikasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.
- e. Sikap para pelaksana, dalam hal ini perilaku dan kecenderungan para pelaksana yang mana dalam hal ini dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah akibat dari formulasi rakyat setempat yang mengetahui tentang persoalan yang terjadi, akan tetapi kebijakan yang dilaksanakan termasuk dalam kebijakan top-down yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui permasalahan wajib yang harus diselesaikan.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, hal ini berkaitan dengan lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dimana peneliti akan menggunakan model implementasi kebijakan milik Thomas B. Smith. Dalam model ini menunjukkan bahwa kondisi internal yang ada dalam instansi yang dilihat dari kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan, bisa sangat memengaruhi keberhasilan implementasi dan juga memiliki pengaruh dalam proses

dalam pelaksanaan implementasi. Yang mana keempat indikator yang kemukakan oleh Thomas B. Smith memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang melihatkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks. Adapun dalam pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada empat indikator model implementasi Smith yang dapat mempengaruhi dala pelaksanaan implementasi ini.

## **2.3 Tinjauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

### **2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut COSO (*the Committee of Sponsoring Organization*) mengenai sistem pengendalian intern yaitu yang mana sistem pengendalian ini mengintegrasikan seluruh aspek operasi dan keuangan suatu perusahaan termasuk manajemen senior beserta karyawan, sasae dan risiko bisnis, dan mencakuo seluruh devisi aktivitas di instansi tersebut (Adhitya . 2020). Versi COSO dalam penerapan pengendalian intern bertujuan bisa mengurangi potensi-potensi penyimpangan dalam berbagai bentuk, meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan atau irganisasi, sserta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi.

Sistem Pengendalian Intern menurut Holmes dan Burns menjelaskan bahwa pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan semua metode serat peraturan yang sederajat, hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaannya, neneriksa kecermataan dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang sudah diwarisi oleh manajemen. Sedangkan mesnurut Institute of Internal Auditors (IIA) pengendalian intern ialah sebagai konsep atau tindakan yang dibuat oleh manajemen, dewan, dan pihak-pihak lain untuk bisa meningkatkan manajemen

risiko dan meningkatkan tercapainya tujuan serta sasaran yang telah ditentukan (Ompusunggu, 2018).

Dari beberapa definis di atas dapat disimpulkan sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dituangkan dalam sebuah kebijakan atau prosedur sebagai alat untuk menjamin tercapainya tujuan suatu organisasi, melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Dan dengan menggunakan sistem pengendalian intern ini juga ditujukan untuk bisa mencegah tindakan-tindakan penyelewengan yang akan merugikan organisasi maupun instansi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan pengertian dari Sistem Pengendalian Intern ini adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilandasi dengan sebuah pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern akan melekat sepanjang dalam kegiatan, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya akan memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern berorientasi pada sebuah objek yang dituju dan Sistem Pengendalian Intern ini dapat juga dikatakan sebagai sebuah alat yang ditujukan kepada orang-orang yang berada pada sebuah perusahaan maupun instansi pemerintahan guna untuk bisa bekerjasama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang dicapai.

Aktivitas yang ada dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemeintah yang baik akan menghasilkan dampak yang baik, berupa informasi yang akurat sehingga dapat mengkomunikasikan informasi yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang tertentu yang dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap informasu yang didapatkan.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern ini disebutkan didalamnya terdapat beberapa unsur yang dipraktikkan di lingkungan pemerintahan ialah:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari semua komponen yang ada dalam pengendalian intern yang lain, selain itu juga lingkungan pengendalian juga menyediakan struktur dan kedisiplinan dalam sistem pengendalian intern tersebut. Dalam lingkungan pengendalian internal terdiri dari sebuah kebijakan, tindakan, dan prosedur yang bisa mencerminkan keseluruhan dari sikap manajemen puncak, para direktur, serta sikap dari pemilik entitas tersebut mengenai pengendalian intern ini. Lingkungan Pengendalian ini juga merupakan fondasi bagi keseluruhan sistem pengendalian intern.

#### 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko sendiri dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintahan yang jelas dan konsisten, tahapan selanjutnya dimana instansi pemerintahan dituntut untuk bisa mengidentifikasi secara efisien dan efektif terkait dengan risiko yang dapat menghambat maksud dan tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan, setelah bisa mengidentifikasi risiko langkah selanjutnya yaitu menganalisis untuk mengetahui pengaruh risiko tersebut terhadap tujuan.

#### 3. Aktivitas Pengendalian

Dalam pengendalian intern aktivitas pengendalian digunakan untuk memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan pengendalian intern ini sesuai dengan arahan pimpinan instansi pemerintahan guna

dalam pelaksanaannya tersebut bisa mengurangi risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penerapan kegiatan pengendalian ini dimulai dengan tahapan reviu atau kinerja instansi, dilanjutkan dengan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen sistem informasi, pengendalian, dan pemisahan tugas yang sesuai.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Dalam proses pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah informasi dan komunikasi digunakan dalam hal mengelola pemerintahan sehingga nantinya informasi yang dikelola dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh informan. Sistem informasi ini sendiri dalam prosesnya menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan, dan informasi yang cukup untuk pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian ini di instansi pemerintahan.

#### 5. Pemantauan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mana proses pelaksanaannya dilakukan melalui pemantauan yang ketat dimulai dengan pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Dan dalam proses pemantauan sistem pengendalian intern ini juga diberikan penilaian atau mutu kinerja sistem pengendalian intern beserta proses yang memberikan keyakinan akan temuan audit dan evaluasi lainnya untuk bisa ditindak lanjuti dalam proses pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut.

Kelima unsur yang ada sistem pengendalian intern tersebut bukanlah unsur-unsur yang berdiri sendiri, melainkan unsur-unsur yang saling terikat dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dimana dalam proses pengendalian yang dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan dan tindakan oleh pimpinan dan para pegawai. Untuk itu yang menjadi pondasi dalam sistem pengendalian ialah orang atau

sumber daya manusia (SDM) di dalam instansi maupun organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi maupun instansi pemerintahan. Keterikatan antara unsur-unsur sistem pengendalian tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 1 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
*Sumber:www.bpkp.go.id*

### 2.3.3 Prinsip Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dimana dalam pelaksanaan implementasi SPIP ini dalam pelaksanaannya terdapat prinsip-prinsip dalam penerapannya:

1. Proses Sistem Pengendalian Intern akan terus menyatu dengan kegiatan integral yang ada di instansi secara terus menerus. Dimana Sistem Pengendalian Intern ini akan lebih efektif lagi ketika sistem ini dibangun dalam infrastruktur instansi yang menjadi bagian dari organisasi tersebut.
2. Dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ini sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai yang melaksanakannya, hal ini juga berpengaruh pada keefektifitasan pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern ini. Sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan tujuan, merancang, dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta tahap akhir yaitu mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern tersebut, barulah efektif atau tidaknya Sistem Pengendalian Intern ini tergantung pegawai instansi tersebut dalam melaksanakan sistem pengendalian ini.

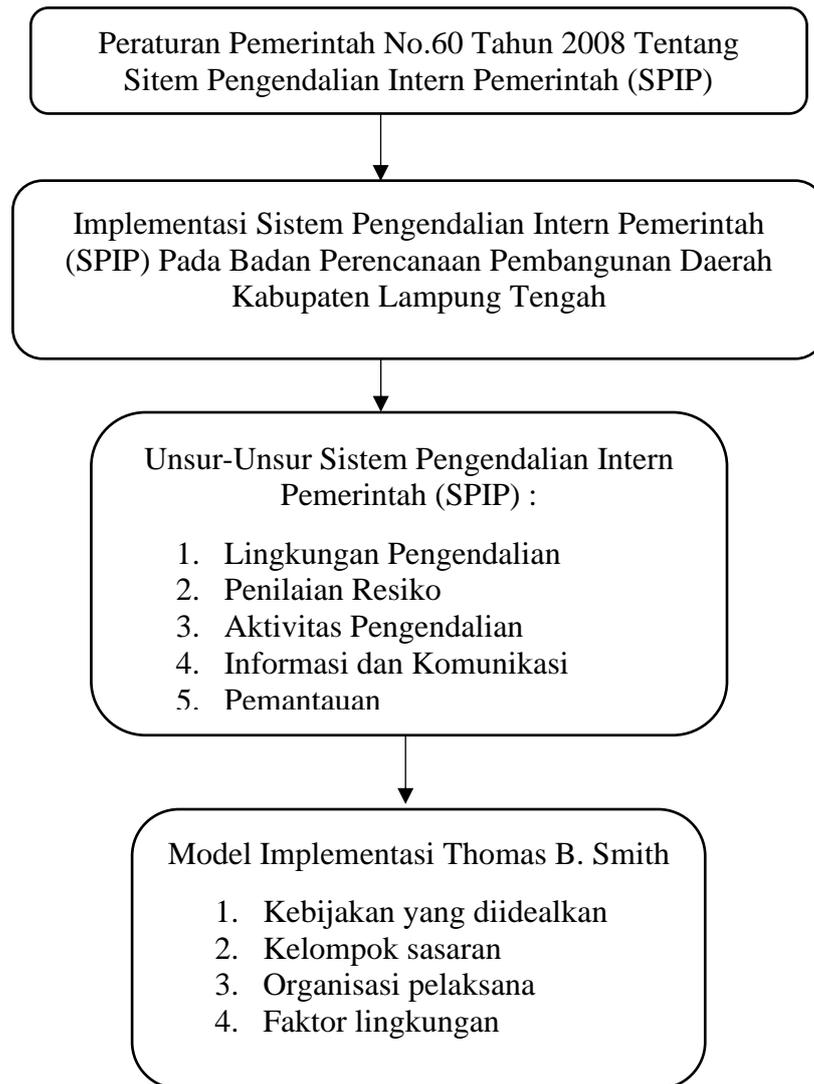
3. Sistem Pengendalian Intern ini akan menjadi sistem yang memadai dalam memenuhi kebutuhan kerja, dan sebagai solusi dalam memecahkan masalah pengendalian intern yang ada di instansi, namun Sistem Pengendalian Intern ini tidaklah bersifat mutlak yang dikarenakan tidak ada yang menjamin dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ini tidak akan terjadi kesalahan seperti adanya kesalahan para pegawai dalam melaksanakannya, pertimbangan yang keliru, dan timbulnya kolusi, dengan begitu tidak adanya jaminan bahwa tujuan instansi akan dapat tercapai menggunakan Sistem Pengendalian Intern ini.
4. Dalam proses pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ini diterapkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan ukuran instansi yang akan menggunakan Sistem Pengendalian Intern ini. Maka dari itu setiap instansi memiliki tujuan yang berbeda-beda menggunakan Sistem Pengendalian Intern ini, sehingga Sistem Pengendalian Intern sulit untuk ditiru dalam proses pelaksanaannya.

#### **2.4 Kerangka Pikiran**

Kerangka pikir dapat diartikan sebagai sebuah model konseptual tentang bagaimana teori yang saling berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai sebuah masalah yang penting (Sugiyono, 2013). Dan dalam penelitian ini tertuju pada implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), dimana implementasi SPIP ini dilihat dari unsur-unsur SPIP yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti implementasi SPIP menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith yang terdiri dari 4 indikator yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, serta faktor lingkungan, melalui 4 indikator tersebut peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi SPIP tersebut yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dari uraian di atas dapat peneliti gambarkan proses dari implementasi Sitem Pengendalian Intern Pemerintah serta model implementasi kebijakan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.



**Gambar 2 Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2022*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sebuah gejala, peristiwa, kejadian, fenomena, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatiannya kepada pemecahan-pemecahan masalah yang aktual sebagaimana pada saat dilaksanakannya penelitian ini.

Sementara itu, menurut Sugiyono pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Melalui penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti bertujuan untuk bisa memaparkan dan menganalisis data-data yang sudah didapatkan selama penelitian di lapangan. Sehingga dapat menggambarkan sebuah kejadian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian dalam sebuah proposal didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan didapatkan di lapangan (Sugiyono, 2013). Kebaruan informasi yang akan diperoleh digubakan untuk bisa memahami secara lebih luas dan mendalam mengenai situasi di lapangan.

Dalam penelitian ini fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan yang didasarkan pada model implementasi yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith menggunakan empat indikator yaitu kebijakan yang di idealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan.

#### **3.2.1 Tahapan-Tahapan Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik dimana suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Tahapan implementasi kebijakan menurut Mulyadi dalam (Makawata, 2019) hanya akan terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Berikut beberapa tahapan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Tahapan pengesahan, dalam hal ini berkaitan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dilandasi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

- b. Pelaksana keputusan oleh instansi pelaksana kebijakan, pelaksanaan SPIP yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya berada di tingkat pemerintahan daerah.
- c. Kesiediaan kelompok sasaran untuk mematuhi output kebijakan, dalam hal ini kelompok sasaran pelaksana SPIP yang dilakukan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, dan untuk bisa melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan dasar hukum kebijakan SPIP tersebut.
- d. Dampak nyata keputusan untuk keluaran selama pelaksanaan kebijakan SPIP ini yaitu diharapkan dapat menciptakan laporan keuangan yang transparan melalui penggunaan SPIP ini dan untuk menghemat waktu dalam pembuatan laporan keuangan tersebut.
- e. Perbaikan atas kebijakan maupun peraturan perundang-undangan, dimana dilihat dari dampak yang akan ditemui dari hasil penelitian implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah diharapkan agar penggunaan SPIP bisa menciptakan laporan keuangan yang transparan dan menghemat waktu selama pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

### **3.2.2 Capaian Implementasi Kebijakan**

Capaian implementasi kebijakan publik dapat dimaknai sebagai sebuah hasil dari tahapan-tahapan selama proses implementasi dilaksanakan, juga capaian implementasi juga dapat digunakan sebagai sebuah pedoman untuk mengetahui berhasil atau tidak suatu proses implementasi kebijakan. Adapun capaian implementasi kebijakan berdasarkan proses tahapan-tahapan implementasi kebijakan publik menurut Mulyadi dalam (Makawata, 2019) pada penelitian

implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

- a. Indikator implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika pada tahap pengesahan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan kebijakan tersebut dan tepat sasaran pada pelaksanaannya.
- b. Indikator implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika kelompok sasaran dari kebijakan SPIP memahami dan bisa menjalankan kebijakan SPIP tersebut.
- c. Indikator implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika tujuan awal dari pelaksanaan SPIP terlaksanakan yaitu menciptakan laporan keuangan yang transparan, serta efektif dan efisien.
- d. Indikator implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika kelompok sasaran dapat menggunakannya dengan baik sesuai dengan output pelaksanaan kebijakan SPIP tersebut.
- e. Indikator implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika pada saat implementasi kebijakan mampu membawa perubahan serta upaya perbaikan dalam laporan keuangan perencanaan melalui penggunaan SPIP.

### **3.2.3 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh seorang ahli implementasi kebijakan yaitu Thomas B. Smith yang terdiri dari kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Berikut penjelasan terkait dengan model implementasi kebijakan yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai sebuah teori variabel implementasi kebijakan sebagai berikut.

- a. Kebijakan yang di idealkan, dalam hal ini menganalisis penerapan kebijakan mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari regulasi atau surat edaran maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, termasuk penerapan unsur-unsur yang ada dalam sistem tersebut, yang dilaksanakan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- b. Kelompok sasaran, dalam riset ini akan menganalisis bagaimana implementor dalam melaksanakan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketanggapan para implementor pelaksana kebijakan, serta terkait dengan arahan-arahan yang diberikan selama pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini.
- c. Organisasi pelaksana, dalam hal ini akan menganalisis terkait dengan bagaimana perkembangan, keefektifvitasan, dan kendala-kendala selama pelaksanaan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Faktor lingkungan, dalam penelitian ini akan lebih berfokus menganalisis pada faktor yang berasal dari luar lingkungan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah seperti faktor ekonomi, dan faktor sosial.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian, lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Nasition bahwa lokasi penelitian ini merujuk pada lokasi sosial yang di dalamnya terdapat tiga unsur yaitu adanya pelaku, tempat, dan kegiatan di lokasi yang akan diobservasi tersebut. Sedangkan menurut Moleong, lokasi penelitian ialah tempat dimana seorang peneliti melakukan sebuah penelitian dalam

mencari fenomena-fenomena atau sebuah peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dengan tujuan mendapatkan data-data yang tepat dan akurat.

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Alasan yang melandasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Lampung Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian ialah karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Tengah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang menggunakan Sistem Pengendalian Intern dalam meningkatkan kinerja mereka, dan penelitian ini dilakukan di salah satu bidang yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Tengah yaitu Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan. Dimana SPIP aspek penting dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk instansi tersebut.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam buku Moleong menurut Lofland dan Lofland yang menjadi sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya ialah berupa data-data tambahan, dokumen, dan lain-lain sebagai penunjang dalam penelitian (J & Moleong, 2017). Dalam penelitian kualitatif terdapat 2 sumber data yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian yaitu

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang memuat data-data utama, data utama yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung di lapangan contohnya data yang diperoleh dari narasumber atau informan. Dalam perolehan data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan, Kepala

Sub Bidang Data dan Informasi, Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan (P2EP).

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekeunder adalah sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung di lapangan, sumber data sekunder berupa buku, dokumen, foto, dan statistik. Data sekunder digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai data pelengkap atau utama ketika data primer dalam hal ini narasumber tidak tersedia maka fungsinya akan berubah menjadi data primer. Dan data sekunder juga digunakan sebagai data tambahan untuk melengkapi penelitian. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berkaitan dengan implementasi SPIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Pengertian lain dari informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti, dimana informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yaitu:

Tabel 3. Nama Informan

No	Informan	Jabatan	Tujuan
1	Abdul Rohmat, SKM, M.H.	Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan	Untuk mengetahui terkait dengan bagaimana pelaksanaan implementasi SPIP ini dan mengetahui

No	Informan	Jabatan	Tujuan
		Evaluasi Pembangunan	
2	Syahfrudhin Widhayarta, SAP, M,S,AK	Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi SPIP ini, dan mengetahui bagaimana proses dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implelementasi SPIP tersebut.
3	Ari Dwi Putriani. S,Sos,	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Dan Pelaporan	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi SPIP ini, dan mengetahui bagaimana proses dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan impelementasi SPIP tersebut.
4	Halimah Tusa'diah, S,E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi SPIP ini, dan mengetahui bagaimana proses dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan impelementasi SPIP tersebut.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data menjadi hal yang strategis dalam sebuah peneltian, karena tujuan utamanya ialah mengumpulkan data-data yang aktual. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari :

#### 3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang

mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan pihak yang menjawab pertanyaan (*interview*). Mengumpulkan data melalui metode wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dikarenakan banyak yang harus diperhatikan dalam teknik wawancara tersebut. Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk bisa menemukan permasalahan yang akan diteliti, serta apabila peneliti juga ingin lebih mengetahui hal-hal lebih dari responden yang lebih mendalam lagi.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan, Kepala Sub Bidang Data dan Informas, dan Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan yang berada dibawah subbidang tersebut. Berikut adalah gambaran data informan dan informasi yang akan dicari oleh peneliti terkait dengan implementasi SPIP tersebut.

Tabel 4 Gambaran Data Informan Penelitian

No	Informan	Informasi Yang Dicari
1	Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pelaksanaan implementasi SPIP di Bappeda kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Perkembangan pelaksanaan SPIP</li> <li>• Pembagian tugas dan kompetensi dalam pelaksanaan SPIP</li> <li>• Sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPIP</li> <li>• Monotoring dalam pelaksanaan SPIP</li> </ul>
2	Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pelaksanaan implementasi SPIP di Bappeda kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan SPIP</li> <li>• Pembagian tugas dan kompetensi dalam pelaksanaan SPIP</li> </ul>

No	Informan	Informasi Yang Dicari
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPIP</li> <li>• Monotoring dalam pelaksanaan SPIP</li> </ul>
3	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pelaksanaan implementasi SPIP yang dilakukan di Bappeda kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> </ul>
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pelaksanaan implementasi SPIP yang dilakukan di Bappeda kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> </ul>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022

### 3.6.2 Observasi

Observasi menurut Nasition (1988) menyatakan observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Dimana para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta yang didapatkan melalui observasi secara langsung, dan data tersebut dikumpulkan dengan bantuan alat yang canggih. Observasi ialah penelitian yang dilakukan dengan mengamati kejadian yang ada di lapangan secara sengaja, sistematis, mengenai kejadian maupun fenomena-fenomena terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dimana peneliti juga mengamati permasalahan yang ditemui di lapangan beserta proses kerja yang dilakukan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan kebijakan ini.

Tabel 5. Gambaran Objek Observasi Penelitian

No	Objek Yang Diamati	Informasi Yang Dicari
1	Kebijakan yang diiedalkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landasan mengenai pelaksanaan implementasi SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Regulasi pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Penerapan unsur-unsur SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Komunikasi selama pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> </ul>
2	Kelompok sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjukan implementor pelaksana SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Ketanggapan asesor pelaksana SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Arahan-arahan yang diberikan selama pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> </ul>
3	Organisasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejauh mana perkembangan pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Keefektifvitasan pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Kendala selama pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> </ul>
4	Faktor Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan SPIP di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah</li> </ul>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022

### 3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari sebuah data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, dokumen, majalah dan sebagainya. Dalam menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian maka peneliti memegang *checklist* untuk mencari variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Moleong menyatakan bahwa dokumen dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi ialah catatan atau sebuah karangan secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Dokumen resmi ialah catatan yang sifatnya formal. Seluruh dokumen yang disajikan dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dokumentasi juga digunakan untuk tambahan data peneliti berupa peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan implementasi SPIP.

Tabel 6. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumen	Informasi Yang Dicari
1	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana dasar pelaksanaan SPIP</li> <li>• Arahan-arahan mengenai sistematika pelaksanaan SPIP</li> <li>• Unsur-unsur dari penerapan SPIP di OPD</li> </ul>
2	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan-arahan mengenai sistematika pelaksanaan SPIP</li> <li>• Pendukung bagaimana pelaksanaan SPIP</li> </ul>
3	Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor 265/KTPS/INSPEKTORAT/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui cara mengatasi risiko-risiko yang muncul selama pelaksanaan SPIP</li> </ul>

Sumber:(Diolah oleh peneliti. Tahun 2022

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data-data kedalam sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema hingga bisa merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hal yang dilakukan saat menganalisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode, serta mengktegorikannya sesuai dengan kelompoknya. Dalam analisis data kualitatif terdapat 3 komponen dalam teknik analisis data ini yaitu :

#### 3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang dinilai penting, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya, serta membuang hal yang dirasa tidak penting. Proses melakukan reduksi data ini dilakukan secara terus menerus saat peneliti melakukan penelitian, dan pada saat proses reduksi data berlangsung bisa dilakukan dengan abstraksi, abtrasksi yang dimaksud adalah membuat rangkuman inti, proses, serta pernyataan-pernyataan yang harus disimpan untuk memastikan keberadaanya dalam data yang akan diolah, sehingga akan menghasilkan catatan-catatan ini dari data yang didapatkan dari hasil pengolahan data tersebut.

Dan dapat dipahami reduksi data memiliki tujuan untuk menyederhanakan data-data yang sudah diperoleh pada saat melakukan penelitian di lapangan. Dalam tahap ini pun peneliti memlih data-data yang akan dibutuhkan dalam meneliti implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan selanjutnya peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan akan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan tema peneliti yang akan diteliti.

### 3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data menurut Miler dan Huberman penyajian data dapat dipahami berupa sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan guna dapat melihat gambaran dari keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari keseluruhan gambaran yang didapatkan. Adapun dalam tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan akan di teliti yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

### 3.7.3 Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari tahapan analisis data, yang mana pada tahapan kesimpulan ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan selama menganalisis data tersebut. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan data dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian tersebut.

## 3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keaslian (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Penelitian kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Artinya keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif untuk bisa memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data dan menggunakan kriteria yaitu :

### **3.8.1 Triangulasi**

Triangulasi menurut Moleong merupakan sebuah teknik keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang digunakan untuk keperluan pengecekan atau membandingkan terhadap data yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara dan dokumentasi di lapangan.

Dalam triangulasi data dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang memiliki sifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah didapatkan. Pada saat menggunakan triangulasi data maka peneliti mrngumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas suatu data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2013).

### **3.8.2 Kecukupan Refensial**

Kecukupan refensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafisiran data. Kecukupan refensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk menganalisis data.

### **3.8.3 Keteralihan**

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada

kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi SPIP yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 masih belum efektif ataupun belum maksimal pelaksanaannya, hal ini diketahui dari masih banyaknya masalah-masalah yang ditemukan selama pelaksanaan SPIP tersebut, dimulai dari membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, risiko-risiko yang masih banyak muncul serta masih ada beberapa kendala yang membuat pelaksanaan SPIP ini belum sepenuhnya efektif. Selain itu untuk unsur-unsur SPIP sudah diterapkan dengan baik selama pelaksanaan SPIP ini.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa untuk penerapan unsur-unsur SPIP selama pelaksanaannya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sudah diterapkan dengan baik yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sudah dilakukan sesuai dengan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, akan tetapi ada beberapa unsur yang belum diterapkan selama pelaksanaan SPIP seperti belum adanya penyediaan layanan web yang bisa diakses oleh masyarakat.

Belum adanya SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang pelaksanaan SPIP, jaringan yang seringkali bermasalah atau error pada saat pelaksanaannya, peraturan atau regulasi yang belum jelas dari Pemerintah Kabupaten, serta dokumen atau administrasi yang masih kurang mendukung, menjadikan kendala pada saat pelaksanaan SPIP ini di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan masih belum efektif pelaksanaan SPIP tersebut

## 5.2 Saran

1. Kebijakan SPIP tetap bisa dilakukan dengan semestinya, namun akan lebih baik jika perlu pembaharuan dalam kebijakan tersebut agar pelaksanaannya bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini.
2. Peningkatan kualitas merupakan modal utama dalam penggerak suatu organisasi dan merupakan *self control* dalam dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern. Maka dari itu dibutuhkan SDM yang berkualitas yang memiliki integritas kerja dan memahami nilai-nilai etik dalam pekerjaan, dan perlunya pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh pegawai yang bertugas dalam hal tersebut.
3. Perlunya dukungan dari pemerintahan daerah terutama dari pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah berupa infrastruktur yang mencakup seperti kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan yang terintegrasi dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Eti, Rochaety. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- J, L., & Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
- Wibawa, S. 2009. *Administrasi Negara: Isu-Isu Kontemporer* . Yogyakarta: Grahara Ilmu.

### Jurnal

- Adhitya, Andika Restu dkk. 2020. "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5(4): 492–96.
- Ahmad, Nasution. 2016. "Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )." *Jurnal Integritas Proses* 3(1):73–82.

- Anis, A. 2020. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Partisipatif Di Kabupaten Brebes. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 5(2), 25-32.
- Anshori, S. 2018. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2(1).
- Azlina, N. 2014. Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi*, 32-36.
- Baziad, Y. N. 2016. *Penerapan SOP Penerimaan Cargo DI PT. GARUDA INDONESIA* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado).
- Duadji, N. 2012. Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *Mimbar*, 201-203.
- Habodin, M., & Damayanti, R. (2021). Pemanfaatan Teknologi dalam Tata Kelola Pemerintahan. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
- Hamid, A., Garusu, I. A., Rauf, D. M., Breemer, J., & Sultraeni, W. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 239-254.
- Hasby, Taufeni Taufik, and Vince Ratnawati. 2018. “Analisis Peran Inspektorat dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti .” *Jurnal Ekonomi* 26:72–87.
- Imronah. n.d. “Implementasi Kebijakan : Prespektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya.” :85.
- Lintang, F. A., & Mintalangi, S. 2018. Ipteks Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 2(2).

- Makawata, R. V. 2019. Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Politico*, 8(3).
- Manga, Piter, Madesen, dkk. 2006. “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung.” (1):150–58.
- Ompusunggu, Sensia Gibsi, dkk. 2018. “Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.” (16): 56–74.
- Paneo, Fitrianty, Jullie J. Sondakh, and Jenny Morasa. 2008. “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Pada Kbupaten Gorontalo.” (1):213–22.
- Rizal, Muhammad. 2015. “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda.” : 1–10.
- Rohmawati, A. 2015. Efektivitas pembelajaran. *Jurnal pendidikan usia dini*, 9(1), 15-32.
- Rondonuwu, C. B., & Kindangen, W. D. 2018. Ipteks Proses Pengelolaan Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(2).
- Rorano, A. M., & Pangkey, M. S. (2013). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 9(2).
- Satya, Venti Eka, Penilaian Risiko, and Aktivitas Pengendalian. 2017. “Penerapan Dan Perspektif Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Di Yogyakarta.” 22: 85–98.
- Satya, Venti Eka, Penilaian Risiko, and Aktivitas Pengendalian. 2017. “Penerapan Dan Perspektif Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Di Yogyakarta.” 22:85–98.

- Sudrajat, A. R., & Yuliana, M. 2021. Implementasi Program Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 6(2), 54-64.
- Sururi, A. 2019. Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menujuterwujudnya Good Public Policy Governance. *Jurnal Good Governance*, 86.
- Supriadi, Y. 2015. Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (1) , 52-66.
- Syarief, Ahmad. 2020. “Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP ) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.” *Indonesian Accounting Research Journal* 1(1):45–52.
- Wicaksono, A. T. 2020. Peran Inspektorat Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 21(1).
- Widya Pratiwi. 2012. “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern ( Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Bungo).” *Junral Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi* XII:82–103

## **Dokumen**

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor 265/KTPS/INSPEKTORAT/2017 mengenai Pedoman Teknis Penilaian Risiko, Evaluasi Terpisah Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Prabumulih